

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Tengah, Kabupaten Bogor: Pendekatan Terpadu Untuk Optimalisasi Potensi Lokal

(Community Empowerment based Tourism Village Development In Karang Tengah Village, Bogor Regency: An Integrated Approach to Optimizing Local Potential)

Mujio^{1,3}, Vely Brian Rosandi^{2,3*}, Novida Waskitaningsih¹, Keisya Rania Zahirah¹, Irma Yunita Chaniago¹

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan, Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Indonesia 16129.

² Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

³ Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB University, Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, RT.02/RW.05, Tegallega, Jawa Barat, Indonesia 16127.

*Penulis Korespondensi: vrosandi@apps.ipb.ac.id
Diterima Desember 2024/Disetujui November 2025

ABSTRAK

Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, memiliki potensi wisata alam yang berkembang berbasis partisipasi masyarakat. Namun, pengelolaan wisata desa belum didukung oleh tata kelola yang terintegrasi dan kelembagaan yang kuat, sehingga koordinasi antar pelaku wisata masih berjalan secara informal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi aparatur desa dan Paguyuban Lokal Guide Sentul dalam merancang pengembangan desa wisata yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Metode pendekatan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui pemetaan stakeholder, identifikasi dan penentuan permasalahan prioritas, perumusan arahan program, serta penguatan kelembagaan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa permasalahan kelembagaan menjadi isu utama dalam pengembangan wisata desa. Berdasarkan analisis akar masalah, disusun arahan program yang meliputi penguatan peran BUMDes, peningkatan kapasitas pengelola wisata, serta penyusunan sistem pariwisata desa yang lebih terkoordinasi. Luaran kegiatan berupa matriks pembagian peran stakeholder, rencana kerja pengembangan wisata desa, serta model koordinasi terpadu yang menempatkan paguyuban lokal sebagai simpul operasional pengelolaan wisata. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran kolektif dan komitmen pelaku wisata dalam membangun tata kelola yang lebih kolaboratif. Pendampingan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat fondasi kelembagaan sebagai prasyarat keberlanjutan desa wisata berbasis masyarakat.

Kata kunci: desa wisata, ekowisata, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, perencanaan terpadu

ABSTRACT

Karang Tengah Village, Babakan Madang Subdistrict, Bogor Regency, has the potential for nature-based tourism that is developed through community participation. However, the management of village tourism is not yet supported by integrated governance and strong institutions, so coordination between tourism stakeholders is still informal. This community service activity aims to assist village officials and the Sentul Local Guide Association in designing a more integrated and sustainable tourism village development plan. The approach used in this community service activity is participatory, involving stakeholder mapping, identification and prioritisation of issues, formulation of programme guidelines, and institutional strengthening. The results of the discussion showed that institutional issues were the main problem in village tourism development. Based on an analysis of the root causes, program guidelines were formulated, including strengthening the role of BUMDes, increasing the capacity of tourism managers, and developing a more coordinated village tourism system. The outputs of the activity were a stakeholder role-sharing matrix, a village tourism development work plan, and an integrated coordination model that placed local associations as the operational hub of tourism management. This activity increased the collective awareness and commitment of tourism actors in building more collaborative governance. This assistance was the first step in strengthening the institutional foundation as a prerequisite for the sustainability of community-based tourism villages.

Keywords: community empowerment, ecotourism, integrated planning, tourism development, tourism village

PENDAHULUAN

Desa dikenal mempunyai sumber daya alam cukup melimpah dan beragam serta penduduknya masih memiliki modal sosial cukup kuat (Mujio *et al.* 2023; Prayitno *et al.* 2023; Aprilia *et al.* 2023;). Apabila perencanaan di desa tidak tepat dan terarah, maka yang terjadi adalah munculnya permasalahan-permasalahan seperti degradasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, pengelolaan yang tidak optimal, sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat desa (Bourdieu 1979; Bubolz 2001; Bowles 2002; Buckley 2012; Grilli 2021). Pendekatan perencanaan desa saat ini masih menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek, sehingga seringkali perencanaan pembangunan desa banyak yang meleset tidak sesuai dengan kondisi alam dan masyarakat desa (Iqbal 2022; Higgins *et al.* 2020; Moscardo *et al.* 2017; Iwahara 2016; Hadiwijoyo 2012). Selain itu pendekatan perencanaan pembangunan juga belum terfokus pada pengembangan komoditas unggulan desa, namun berfokus pada infrastruktur (Ven 2015; Mowforth 2016; Pan 2018; Sylvine 2019; Richmond 2022).

Desa Karang Tengah berada di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah kurang lebih 2.894 ha (BPS 2022; BPS 2023). Jarak tempuh Desa Karang Tengah ke ibukota kabupaten sejauh 15 km (BPS 2022; BPS 2023). Ketinggian Desa Karang Tengah kurang lebih 529 mdpl, dengan topografi berupa dataran rendah perbukitan dan pegunungan. Desa Karang Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, dengan sebaran potensi wisata cukup banyak, yaitu kurang lebih ada 10 destinasi ekowisata (BPS 2023; BPS 2022). Desa Karang Tengah juga mempunyai pesawahan dengan komoditas tanaman pangan dan hortikultura (BPS 2023).

Permasalahan pengembangan wisata Desa Karang Tengah saat ini adalah pengelolaan obyek ekowisata yang belum dikelola secara maksimal, padahal potensi pasar cukup besar, karena posisinya berbatasan langsung dengan kawasan Pengembangan Kota Mandiri Sentul City (Hashemkhani 2015). Pengembangan ekowisata berbasis alam di Desa Karang Tengah juga menjadi salah satu alternatif wisata ke Puncak Bogor yang saat ini sudah mulai pada titik kejenuhan karena kemacetan. Permasalahan utama belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata di Desa Karang Tengah adalah karena belum ada perencanaan pengembangan wisata

desa secara detail terpadu, mulai dari aspek daya tarik wisata (*attraction*), aksesibilitas (*accessibility*), fasilitas pendukung (*amenity*), serta kelembagaan (*ancillary services*) (McGehee 2016). Atas dasar kondisi tersebut, maka perlu perencanaan dalam merancang pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

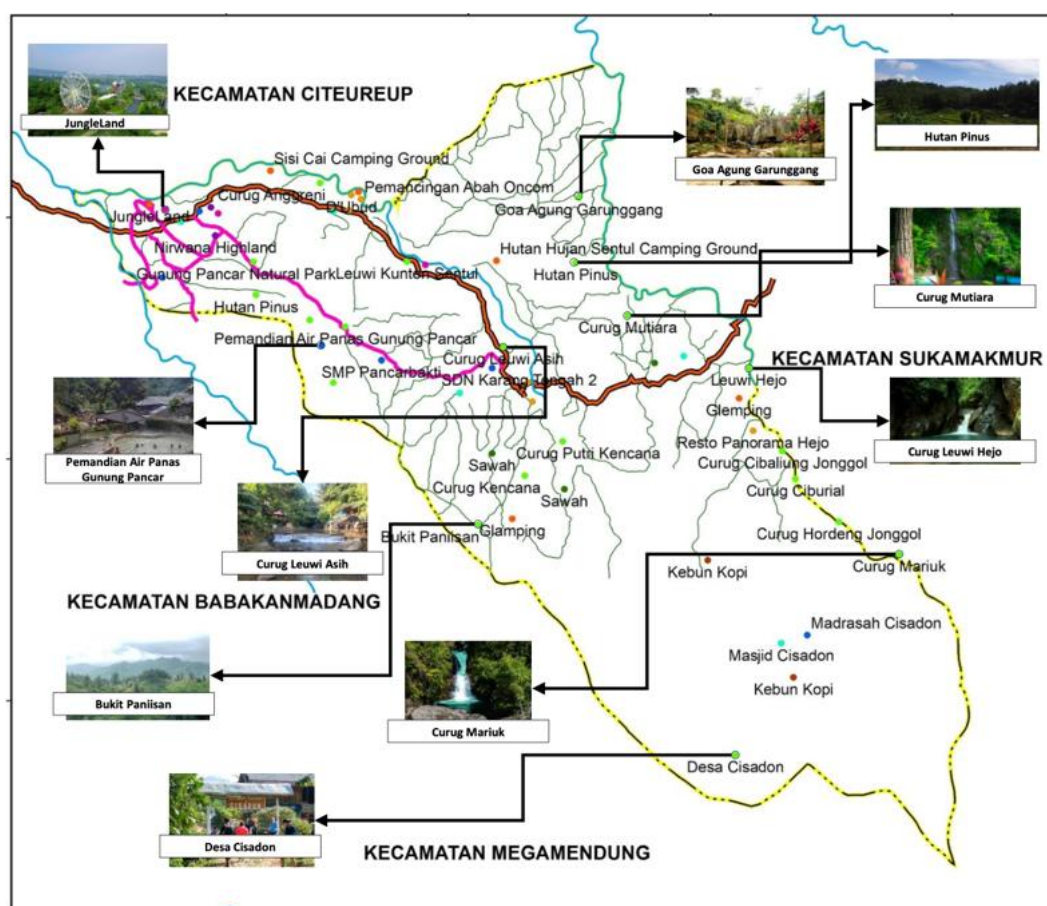
Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pendampingan pelaku wisata desa, baik aparatur desa maupun karang taruna, khususnya kelompok Paguyuban Lokal Guide Sentul (PLGS) dalam merencanakan pengembangan desa wisata secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun tujuan khususnya adalah: 1) Membantu mengidentifikasi stakeholder wisata desa di Desa Karang Tengah; 2) Membantu merumuskan permasalahan prioritas dalam pengembangan wisata desa; 3) Membantu merumuskan arahan program pengembangan wisata desa; dan 4) Pendampingan penguatan kelembagaan dan jaringan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi, Waktu, dan Partisipan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu bulan Juni-Desember 2024 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Gambar 1). Desa ini terletak di kaki Gunung Salak, yang memiliki ketinggian 700–1.000 mdpl. Secara administratif, Desa Karang Tengah mencakup area yang didominasi oleh hutan, sawah, dan lahan perbukitan yang subur. Lokasinya yang berdekatan dengan destinasi wisata seperti Curug Nangka dan Gunung Bunder membuatnya strategis untuk pengembangan desa wisata berbasis alam dan budaya. Secara klimatologis, desa ini memiliki iklim sejuk dengan suhu rata-rata 20–24°C sepanjang tahun, serta curah hujan yang relatif tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk ekowisata dan agrowisata. Desa Karang Tengah juga memiliki sejarah budaya yang kaya, dengan tradisi agraris yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perhutanan, dan kerajinan tangan, menjadikan potensi wisata budaya dan ekonomi lokal sebagai aspek yang penting untuk dieksplorasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa kelompok utama sebagai partisipan, yaitu: 1) Penduduk setempat yang berperan penting sebagai pemilik potensi wisata



Gambar 1 Lokasi studi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

budaya dan alam, serta sebagai pelaku ekonomi lokal; 2) Pengurus Paguyuban Lokal Guide Sentul; 3) Penduduk dewasa yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial di desa, seperti petani, pengrajin, dan tokoh adat, *tour guide*; 3) Perangkat desa dan pemangku kepentingan lokal, termasuk kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemimpin informal seperti tokoh adat dan agama yang memiliki wawasan mendalam mengenai pengelolaan sumber daya lokal. Mereka terlibat dalam wawancara dan Forum Group Diskusi (FGD) untuk memberikan pandangan strategis mengenai tata kelola desa wisata, tantangan, serta peluang yang ada di desa; 4) Pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor kerajinan, kuliner lokal, serta jasa wisata, yang diharapkan berperan aktif dalam membangun jaringan usaha untuk mendukung; dan 5) Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, perwakilan dari Dinas Pariwisata akan dilibatkan untuk memberikan masukan terkait kebijakan daerah dalam pengembangan desa wisata, termasuk aspek perizinan, pengelolaan, dan pemasaran yang sejalan dengan rencana tata

ruang wilayah dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam mendukung setiap tahap kegiatan, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan laporan. Bahan yang digunakan meliputi peralatan meta plan (*metacard*, kertas plano, spidol, isolatif dan lain-lain), kuesioner dan panduan wawancara, yang dirancang untuk menggali informasi dari masyarakat lokal, perangkat desa, pelaku UMKM, pengembangan desa wisata.

Kegiatan pemetaan potensi wisata menggunakan alat peta dan beberapa alat tulis, yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi potensial seperti area pertanian, hutan, dan infrastruktur yang mendukung pariwisata. Alat tulis, notebook dan perekam suara juga digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan observasi lapangan. Kamera digital atau smartphone berfungsi untuk mendokumentasikan kondisi desa, potensi wisata, dan fasilitas yang ada, guna mendukung analisis visual. GPS juga

digunakan untuk menentukan koordinat lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensi wisata.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang bersifat kolaboratif. Fokus utama kegiatan adalah melakukan pendampingan kepada para pelaku wisata desa, meliputi aparat pemerintah desa, karang taruna, serta PLGS, dalam menyusun perencanaan pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, sementara tim pengabdian berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan arahan teknis dan penguatan kapasitas. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara bertahap sesuai dengan tujuan pengabdian yang telah ditetapkan. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- **Tahap 1: identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan**

Tahap awal difokuskan pada pengenalan dan pemetaan aktor-aktor yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan serta pengembangan wisata di Desa Karang Tengah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan serta diskusi partisipatif untuk memperoleh gambaran mengenai struktur aktor yang terlibat.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui FGD dan wawancara semi-terstruktur yang melibatkan perangkat desa, karang taruna, pelaku UMKM, pengelola destinasi wisata, serta anggota PLGS. Dalam proses ini, dilakukan pendampingan untuk menyusun peta stakeholder menggunakan pendekatan analisis kepentingan dan tingkat pengaruh secara sederhana. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam memahami peran masing-masing aktor, kapasitas yang dimiliki, serta peluang sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan desa wisata.

- **Tahap 2: identifikasi dan penentuan permasalahan prioritas**

Setelah struktur pemangku kepentingan terpetakan, kegiatan dilanjutkan dengan proses identifikasi persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wisata desa. Tahap ini dilaksanakan melalui FGD tematik dan diskusi kelompok terarah guna menggali berbagai kendala,

kebutuhan, dan tantangan yang dirasakan oleh para pelaku wisata.

Permasalahan yang terhimpun kemudian disusun dan dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya terhadap pengembangan wisata. Penentuan prioritas dilakukan secara partisipatif menggunakan teknik penilaian sederhana yang mempertimbangkan urgensi, dampak, serta peluang penyelesaian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa isu yang dipilih sebagai prioritas benar-benar merepresentasikan kebutuhan kolektif masyarakat.

- **Tahap 3: penyusunan arahan program dan rencana tindak lanjut**

Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder dan penentuan isu prioritas, kegiatan selanjutnya adalah mendampingi masyarakat dalam merumuskan arah program pengembangan desa wisata. Pada tahap ini, peserta kegiatan difasilitasi untuk menyusun rencana kerja yang mencakup program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Pendampingan dilakukan melalui lokakarya partisipatif dengan metode diskusi terarah, curah pendapat, serta penyusunan matriks rencana aksi. Program yang dirancang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas layanan wisata, strategi promosi, serta pengembangan jejaring kemitraan.

- **Tahap 4: penguatan kelembagaan dan jaringan kerja**

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan program, dilakukan pendampingan untuk memperkuat struktur dan tata kelola kelembagaan kelompok wisata, khususnya PLGS. Kegiatan ini mencakup penegasan fungsi dan peran organisasi, penyusunan pola koordinasi internal, serta eksplorasi peluang kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah maupun mitra swasta.

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan kombinasi teknik pengumpulan informasi berupa observasi, wawancara, diskusi kelompok, serta telaah dokumen desa dan perencanaan wilayah. Pendekatan ini memungkinkan proses triangulasi informasi secara sederhana sehingga rekomendasi program yang dihasilkan lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan dan Struktur Keterkaitan Stakeholder Wisata Desa

Tahap awal kegiatan pengabdian difokuskan pada pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata Desa Karang Tengah. Proses ini dilakukan melalui FGD pertama dengan pendekatan partisipatif, dimana para peserta diminta mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan wisata desa.

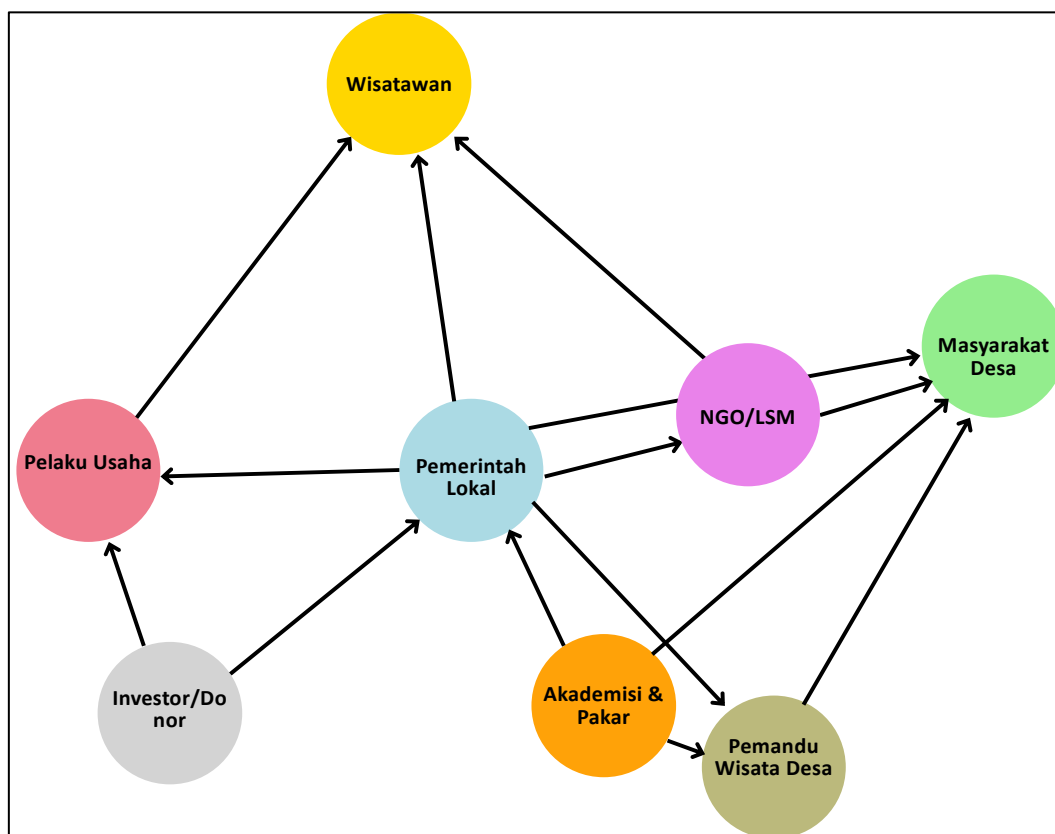
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sistem wisata desa melibatkan delapan kelompok utama, yaitu pemerintah desa, masyarakat desa, pelaku usaha lokal, PLGS, akademisi, NGO/LSM, investor/donor, serta wisatawan sebagai pengguna akhir layanan.

Analisis lebih lanjut terhadap relasi antar aktor memperlihatkan adanya struktur jejaring bertingkat. Masyarakat desa, pelaku usaha, dan pemandu wisata berada pada lingkaran inti karena berinteraksi langsung dengan wisatawan dalam aktivitas operasional. Pemerintah desa berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sementara akademisi dan NGO berfungsi sebagai pendamping strategis. Investor dan donor berada

pada posisi yang lebih eksternal, dengan keterlibatan yang bergantung pada kebutuhan pembiayaan.

Pemetaan ini mengungkap bahwa sebelum pendampingan dilakukan, hubungan antar aktor berjalan secara informal dan belum memiliki sistem koordinasi yang terstruktur. Temuan ini menjadi dasar untuk melanjutkan proses identifikasi persoalan yang lebih mendalam.

Pada kegiatan FGD juga dilakukan pemetaan keterkaitan antara stakeholder satu dengan lainnya dalam penyelenggaraan wisata desa (Gambar 2). Arah panah menggambarkan aliran pengaruh atau dukungan. Contohnya, pemerintah desa memberikan regulasi kepada masyarakat desa, sementara wisatawan memberikan umpan balik kepada masyarakat dan pemandu wisata desa memberikan bantuan pada wisatawan dalam kegiatan wisatanya. Gambar 2 menunjukkan bahwa struktur hubungan antar stakeholder membentuk pola jejaring bertingkat (*core-periphery*). Aktor operasional seperti masyarakat, pelaku usaha, dan pemandu wisata berada pada lingkaran inti karena berinteraksi langsung dengan wisatawan. Pemerintah desa dan PLGS memiliki posisi strategis sebagai pengatur dan koordinator, sedangkan akademisi



Sumber: hasil FGD dan pemetaan partisipatif (2024).

Gambar 1 Keterkaitan antara stakeholder dalam kegiatan wisata desa di Desa Karang Tengah.

dan mitra eksternal berada pada lingkaran pendukung.

Perumusan Permasalahan Prioritas Pengembangan Wisata Desa

Tahap kedua dilakukan melalui FGD lanjutan yang berfokus pada identifikasi dan sintesis permasalahan. Pada tahap awal ("belanja masalah"), peserta diminta menuliskan persoalan yang mereka hadapi dalam pengelolaan wisata. Dari proses ini terkumpul 35 isu yang mencerminkan kompleksitas tantangan di lapangan. Melalui diskusi bersama, seluruh isu tersebut kemudian dianalisis dan dikelompokkan menjadi delapan kategori utama, yaitu: 1) Atraksi wisata; 2) Lingkungan; 3) Amenitas; 4) Aksesibilitas; 5) Promosi dan pemasaran; 6) Kelembagaan; 7) Peran serta masyarakat; dan 8) Kemitraan. Gambar 3 menunjukkan kegiatan diskusi potensi dan permasalahan wisata Desa Karang Tengah.

Proses reduksi ini tidak hanya menyederhanakan daftar masalah, tetapi juga membantu peserta melihat keterkaitan antar isu. Masalah fisik seperti jalan berlubang atau fasilitas parkir ternyata memiliki hubungan dengan aspek manajerial dan kelembagaan. Pemungutan suara partisipatif untuk menentukan fokus intervensi. Setiap peserta memilih dua isu yang dianggap paling mendesak untuk ditangani dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memperoleh suara tertinggi, diikuti oleh aksesibilitas.

Dominannya isu kelembagaan menunjukkan kesadaran kolektif bahwa persoalan utama bukan semata keterbatasan fasilitas, melainkan belum adanya sistem tata kelola yang terintegrasi. Sementara itu, aksesibilitas dipandang penting karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan keamanan wisatawan. Temuan ini menjadi pijakan utama dalam merancang intervensi pengabdian yang lebih terarah.



Gambar 3 Kegiatan diskusi potensi dan permasalahan Wisata Desa Karang Tengah.

Berdasarkan hasil voting yang menempatkan aspek kelembagaan sebagai prioritas utama, maka kegiatan pendampingan selanjutnya difokuskan pada perumusan arahan program yang berbasis pada analisis akar permasalahan kedua isu tersebut.

Perumusan Arahan Program Pengembangan Wisata Desa

Tahap selanjutnya dalam kegiatan pendampingan adalah merumuskan arahan program pengembangan wisata desa sebagai tindak lanjut atas permasalahan prioritas yang telah disepakati bersama. Tahapan ini secara langsung menjawab tujuan khusus pengabdian, yaitu membantu pelaku wisata desa dalam menyusun arah pengembangan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Perumusan program dilakukan melalui diskusi mendalam dengan peserta FGD, dengan menelusuri akar permasalahan dari isu utama yang dipilih, yaitu kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan agar solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif terhadap gejala, tetapi mampu menyentuh penyebab utama permasalahan.

Proses identifikasi akar masalah dilakukan secara partisipatif, di mana peserta diminta mengurai hubungan sebab akibat dari setiap isu prioritas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan berakar pada belum aktifnya BUMDes, lemahnya profesionalitas pengelola, serta belum adanya sistem pariwisata desa yang terintegrasi. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan arahan program sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Arahan program yang dirumuskan pada aspek kelembagaan, lebih menekankan pada penguatan sistem dan kapasitas. Pengaktifan kembali BUMDes, peningkatan kompetensi pengelola wisata, serta penyusunan sistem pariwisata desa yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Penerapan Model Penguatan Kelembagaan Wisata Desa

Berdasarkan hasil prioritas tersebut, kegiatan pendampingan difokuskan pada penguatan tata kelola dan koordinasi antar pelaku wisata. Proses fasilitasi menghasilkan kesepakatan mengenai perlunya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Inovasi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah penyusunan model koordinasi terpadu wisata desa, yang menempatkan PLGS sebagai

Tabel 1 Arahan program pengembangan wisata desa berdasarkan akar permasalahan

Permasalahan prioritas	Akar permasalahan	Arahan program
Kelembagaan	• Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berjalan	• Mendorong mengaktifkan kembali BUMDes dan bekerjasama dengan paguyuban lokal guide dalam
	• Belum profesionalnya para pengelola wisata	• Pelatihan pengelola wisata
	• Tidak adanya sistem pariwisata desa yang terintegrasi	• Perencanaan sistem pariwisata desa yang terintegrasi
	• Kurangnya kolaborasi antara pengelola wisata dengan pihak pemerintah	• Peningkatan kolaborasi antara pengelola wisata dengan pihak pemerintah
	• Tidak adanya badan usaha atau lembaga terkait keamanan dan kemajuan wisata	• Pengembangan badan usaha atau lembaga terkait keamanan dan kemajuan wisata

Sumber: hasil FGD-2 dan pendampingan partisipatif (2024).

simpul koordinasi operasional. Peran masing-masing pihak dalam model ini adalah 1) Pemerintah desa berfungsi sebagai regulator dan pemberi legitimasi kebijakan; 2) PLGS berperan sebagai koordinator operasional kegiatan wisata; 3) Masyarakat dan pelaku UMKM menjadi penyedia layanan dan produk wisata; dan 4) Akademisi dan mitra eksternal berfungsi sebagai penguat kapasitas dan pendamping teknis.

Perubahan yang terjadi bukan sekadar penambahan struktur organisasi, tetapi penguatan fungsi dan alur komunikasi antar aktor. Sistem yang sebelumnya berjalan secara parsial mulai diarahkan menjadi satu kesatuan kerja yang lebih terintegrasi. Model ini juga memperkenalkan mekanisme umpan balik yang lebih sistematis, dimana masukan wisatawan dapat dihimpun dan ditindaklanjuti melalui koordinasi PLGS.

Luaran Kegiatan dan Perubahan yang Terjadi

Kegiatan pengabdian ini menghasilkan beberapa luaran nyata, antara lain: a) Tersusunnya matriks pembagian peran stakeholder; b) Disepakatinya model koordinasi terpadu wisata desa; c) Dirumuskannya rencana kerja awal pengembangan wisata desa; dan d) Terbentuknya forum komunikasi rutin antar pelaku wisata. Apabila dibandingkan dengan kondisi awal, terdapat perubahan yang signifikan dalam hal kejelasan peran, pola komunikasi, serta kesadaran kolektif akan pentingnya kerja kolaboratif. Perubahan ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi menghasilkan kerangka tata kelola baru yang dapat dijadikan dasar pengembangan lebih lanjut.

Implikasi terhadap Strategi Pemberdayaan

Struktur stakeholder dan prioritas masalah yang telah dirumuskan memberikan arah yang lebih jelas bagi strategi pemberdayaan. Penguatan kapasitas difokuskan pada aktor inti yang berinteraksi langsung dengan wisatawan, sementara penguatan tata kelola diarahkan pada koordinasi antar lembaga. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pemberdayaan dilakukan secara berjenjang dan sesuai posisi masing-masing aktor dalam ekosistem wisata desa. Dengan demikian, intervensi tidak bersifat umum, tetapi kontekstual dan berbasis kebutuhan riil. Secara konseptual, model yang dihasilkan mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif dalam skala desa. Keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh komitmen bersama dan integrasi model ini dalam kebijakan desa.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Karang Tengah menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola dan koordinasi antar pelaku lokal. Melalui proses pendampingan partisipatif, kegiatan ini berhasil memetakan struktur stakeholder, mengidentifikasi permasalahan prioritas, serta merumuskan arahan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan menjadi isu paling mendasar dalam pengembangan wisata desa. Kesadaran ini mendorong lahirnya model koordinasi terpadu yang menempatkan PLGS sebagai simpul operasional dalam pengelolaan

wisata. Model tersebut memperjelas pembagian peran antara pemerintah desa, pengelola wisata, pelaku UMKM, dan mitra pendukung, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan rencana program, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan dan komitmen kolektif yang menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Karang Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas dukungan dan kesempatan yang diberikan melalui skema pengabdian masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada institusi-institusi yang telah berkontribusi, yaitu Universitas Pakuan dan IPB University yang telah memberikan dukungan baik dalam hal sumber daya maupun kolaborasi. Kerjasama yang erat dan komitmen bersama telah menjadikan kegiatan ini lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Desa Karang Tengah. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi pengembangan masyarakat dan potensi wisata desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia E, Prayitno G, Usman F, Biloshkurska NV, Siankwilimba E, Simamba H. 2023. Social capital and community participation in the development of the aquaculture center in Soko Village Indonesia. *Journal of Regional and Rural Studies*. 1 (1): 6-14. <https://doi.org/10.21776/rrs.v1i1.3>
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2023. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2022.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2023. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2023.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2023. Kecamatan Babakan Madang Dalam Angka Tahun 2022.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2023. Kecamatan Babakan Madang Dalam Angka Tahun 2023.
- Bourdieu P. 1979. Les trois états du capital culturel. *Actes de La Recherche En Sciences Sociales*. 30 (1): 3-6. <https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654>
- Bowles S, Gintis H. 2002. Social capital and community governance. *Economic Journal*. 112 (483): 419-436. <https://doi.org/10.1111/1468-0297.00077>
- Bubolz M. 2001. Family as source, user, and builder of social capital. *Journal of Socio Economics*. 30 (2): 129-131. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00091-3](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00091-3)
- Buckley R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39 (2): 528-546. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003>
- Desbiolles FH. 2020. Socialising tourism for social and ecological justice after COVID. *Tourism Geographies*. 22 (3): 610-623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- Grilli G, Tyllianakis E, Luisetti T, Ferrini S, Turner RK. 2021. Prospective tourist preferences for sustainable tourism development in Small Island developing States. *Tourism Management*. 82: 104178. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104178>
- Hadiwijoyo SS. 2012. Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). In Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Iqbal A, Ramachandran S, Siow ML, Subramaniam T, Afandi SHM. 2022. Meaningful community participation for effective development of sustainable tourism: Bibliometric analysis towards a quintuple helix model. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*. 39: 100523. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100523>
- Iwahara H. 2016. Sustainable tourism discourse and practice: A case study of village-ecotourism in southern Bali. In Putra ID, Campbell S. Recent developments in Bali tourism. Page: 193-213. Buku Arti.
- McGehee NG, Andereck K. 2016. Social capital and tourism. *Encyclopedia of tourism*. Springer Meteor. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_179

- Moscardo G, Konovalov E, Murphy L, McGehee NG, Schurmann A. 2017. Linking tourism to social capital in destination communities. *Journal of Destination Marketing & Management*. 6 (4): 286–295. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.10.001>
- Mowforth M, Munt I. 2016. Tourism and sustainability: New tourism in the Third World (4th ed.). 1st 1998 Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203437292>
- Mujio, Rahayu RA, Waskitaningsih N, Mulyadi E. 2023. Village Development Sustainability Analysis: A Case Study in Cijeruk, Bogor Regency. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*. 4(1): 57–68. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i1.413>
- Pan SY, Gao M, Kim H, Shah KJ, Pei SL, Chiang PC. 2018. Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of the Total Environment*. 635: 452–469. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134>
- Prayitno G. 2023. Social capital for sustainable tourism development in Indonesia. *Journal of Cogent Social Science*. 14(4): 73–88.
- Richmond L, Casali L. 2022. The role of social capital in fishing community sustainability: Spiraling down and up in a rural California port. *Marine Policy*. 137: 104934. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104934>
- Sylvine PC, Gde BIK, Nyoman DPI. 2019. The integrated touristic villages: An Indonesian model of sustainable tourism?. *Tourism Geographies*. 23 (3): 623–647. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1600006>
- Ven S. 2015. Host residents' attitude toward community-based ecotourism: Empirical study in southwestern Cambodia. *Journal of Tourism and Hospitality*. 4: 1–11.
- Zolfani SH, Sedaghat M, Maknoon R, Zavadskas EK. 2015. Sustainable tourism: A comprehensive literature review on frameworks and applications. *Economic Research Ekonomska Istraživanja*. 28 (1): 1–30. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2014.995895>